BAB II
KERANGKA KONSEPTUAL

A. Pemahaman Implementasi dan Pelayanan Pemakaman

1. Implementasi

Secara etimologi implementasi diartikan dengan pelaksanaan[1] atau penerapan[2]. Dalam penjelasan disebut dengan penerapan atas kesepakatan[3]. Dalam terminologi disebut bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan, bioraksi yang efektif [4].

Implementasi juga dapat dipahami menurut para ahli yaitu Usman menjelaskan dalam bukunya bahwa sebuah penerapan harus dilakukan secara terencana, dengan kata lain dalam pengaplikasinya, penerapan bukan sekedar bentuk kegiatan semata, namun harus memiliki tujuan yang jelas[5]. Winarno juga menyebutkan bahwa implementasi adalahtindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan[6]. Disamping keduanya, Harsono dalam karyanya berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* menyatakan dari implementasi adalah sebuah kebijakan yang harus berformasi menjadi

---

[1]Widodo, et el, *Kamus Ilmiah Popular*, Jogjakarta: Absolut, tt, hlm. 223.

[2]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2009, hlm. 346.

[3]Lukman Ali, et el, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm.529.

[4]Rini Hadiyanti, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman organisasi perangkat daerah pemerintah kota samarinda, *Jurnal Tidak diterbitkan,*Samarinda, 2013, hlm.2.

[5]Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung: Sinar Baru, 2002, hlm.70.

[6]Winarno, *Kebijakan Publik,* Jakarta: Buku Seru, 2014, hlm.149.

tindakan dalam pelaksanaannya dan dapat menyempurnakan suatu program yang telah ditetapkan[7].

Pemahaman implementasi juga dibangun Fredrich yang menformulasikannya menjadi kebijakan tindakan yang mengarah ke tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah pada lingkungan tertentu. Karena ada hambatan tertentu saat mencari kesempatan untuk pencapaian tujuan atau dalam mewujudkan sasaran yang diinginkan[8]. Browne dan Wildavsky yang dikutip dari Nurdin dan Usman mengemukakan bahwa implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan[9].

Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Guntur Setiawanbahwa implementasi adalah aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan, biokrasi yang efektif[10]. Abdul Wahab menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, penjabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan[11]. Menurut Mazmanian dan sabatierbmenjelaskan implementasi adalah pelaksanaan dari

---

[7]Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Yogyakarta: Rihnheka, 2006, hlm.67

[8]Friedrich dalam wahab, *Implementasi Kebijakan*, tp, 2003, hlm.132.

[9]Browne, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah,* Bandung: Tjipto, 2003, hlm.7.

[10]Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan,* Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004, hlm.39.

[11]Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi Kebijahanan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm.65.

kebijakan dasar hukum yang juga berbentuk perintah, keputusan[12]. Prana Wastra dkk arti implementasi adalah sebuah aktivitas yang dikerjakan karena adanya kebijaksanaan yang sudah disusun sebelumnya, meliputi kebutuhan apa saja yang diperlukan, siapa pelaksana, kapan pelaksana, serta kapan akan diselesaikan target itu sendiri. Menurut Agustino, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan tersebut mendapatkan hasil dan tujuan sebagai kebijakan itu sendiri[13].

Berdasarkan pengertian Implementasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi merupakan serangkaian bentuk aktivitas dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan yang sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang baik berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

2. Pelayanan Pemakaman

Kalimat "Pelayanan pemakaman" diambil dari 2 kata yaitu "pelayanan" dan "pemakaman", secara etimologi pelayanan dari kata "layan" yaitu membantu dan menyiapkan (mengurus). Dalam penjelasan disebut bahwa membantu seseorang dalam mengurus apa yang dibutuhkan seseorang. Dalam terminologi disebut bahwa Pelayanan adalah kegiatan yang didefinisikan sebagai penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain dengan tujuan tertentu. Definisi itu mengandung makna, bahwa pelayanan adalah sebuah aktivitas yang sifatnya sebagai penghubung yang diberikan dengan tujuan yang dicapai.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian Pelayanan bahwa "Pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain. Adapun Istilah Pelayanan Menurut Para

---

[12]Mazmanian, Sabatier, *Implementasi and public policy*, New York: Harper Collins, hlm.21.

[13]Agustino, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn,* Jakarta: Rajawali Pres, 2010, hlm.139

Ahli, seperti Fandy Tjiptono Jasa (*servise*) merupakan aktifitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual[14]. Menurut Kotler yang dikutip Toni Wijaya "jasa atau pelayanan adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan apapun"[15].

Kotler menyebutkan bahwa pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan dapat diartikan oleh suatu pihak kepada pihal lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tindak mengakibatkan kepemilikan apapun[16]. Menurut Moenir pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkeseimbangan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat[17]. Dari pemahaman lain, Sinambelamengemukakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu pokok secara fisik[18].

Zein dalam bukunya *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan suatu yang harus dikerjakan dengan baik[19], sedangkan definisi Mahmoedin adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan

---

[14]Fandy Tjiptono, *Manajemen Kualitas Jasa*, Yogyakarta : Andi Offset, 2005, hlm.150.

[15]Toni Wijaya, *Manajemen Kualitas Jasa*,Yogyakarta: Atma Jaya, 2011, hlm.150.

[16]Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta : Erlangga,2008,hlm.13.

[17]Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm.13.

[18]Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008, hlm.26.

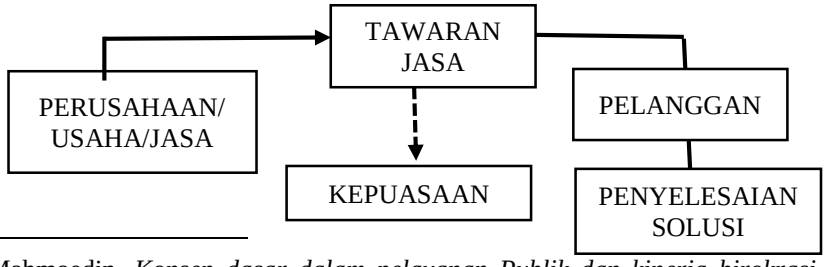
[19] Mohammad Zain, *Manajemen Pelayanan umum di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm.126.

konsumen[20]. Seperti keduanya,Swastamenilai bahwa pelayanan adalah kegiatan yang didefinisikan sebagai penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain dengan tujuan tertentu. Definisi itu mengandung makna, bahwa pelayanan adalah sebuah aktivitas yang sifatnya sebagai penghubung yang diberikan dengan tujuan yang dicapai[21].

Han dan leong seperti dikutip dari Swasta menegaskan bahwa pelayanan sebagai proses dari pelayanan khusus yang terdiri dari sejumlah kegiatan tahap sebelumnya dan tahap yang akan datang dimana konsumen berinteraksi dengan organisasi jasa pelayanan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kepuasan konsumen serta memberikan nilai kepada konsumen yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pelayanan adalah Aktifitas yang ditawarkan untuk dijual satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tindak mengakibatkan kepemilikan apapun, menguntungkan serta menawarkan kepuasan karena terjadi interaksi antara konsumen dengan Pelanggan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan sebagai upaya memecahkan permasalahan konsumen yang bersifat penghubung dengan organisasi jasa pelayanan. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:

GAMBAR 2.1

Operasionalisasi Pelayanan



[20] Mahmoedin, *Konsep dasar dalam pelayanan Publik dan kinerja birokrasi*, Jakarta: Andi Offset, 2010, hlm. 96.

[21] Swasta,*Konsep Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik,* Jogjakarta: depublish, 2003, hlm. 342

Sumber: Telaah Data, 2019

Selanjutnya kata makam berarti Kuburan. Kata kuburan dari kata dasar kubur berasal dari bahasa Arab, yang berarti memendam, memasukkan, melupakan, mengebumikan. Kubur dari bahasa Arab adalah kata kerja (*verba*) yang berarti menanam atau memendam sesuatu. Kosa kata tersebut berhubungan dengan jenazahatau bangkai hewan di dalam tanah. Sehingga kata "kubur" yang dihubungkan dengan ke-an menjadi kuburan adalah tempat dimana jenazah-jenazah dikubur, juga disebut pemakaman[22].

Kuburan juga dapat dipahami dengan makam yang berarti tempat tinggal atau kediaman yang biasanya untuk orang yang telah meinggal dunia. Kata makam diidentikkan untuk kelompok orang yang meninggal dari kalangan yang terkenal dimasyarkat menurut fuqaha. Kuburan atau makam adalah memendam, memaksukkan, melupakan, memakamkan atau menguburkan jenazah yang hukumnya fardu Kifayah sebagaimana halnya memandikan, mengafani, dan mengshalatkan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka kuburan adalah memendam, memaksukkan, melupakan jenazah yang dikubur di dalam tanah. dari dua hal yang ditelaah dapat dipahami bahwa pelayanan kuburan adalah aktifitas yang ditawarkan oleh pemerintah kota/daerah untuk melayani ahli waris yang mengalami musibah kematian dengan memberikan tanah khusus melalui jasa layanan penguburan dan yang berhubungan dengan aktfitasnya .

[22]Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm. 748

B. Konsep dasar Implementasi

Secara umum impelemtasi yang dipahami melalui etimologi dan terminologi tersebut memberikan konsep utama atas hal tersebut yaitu penjabaran dari konsep melalui kegiatan suatu kebijakan atau program yang telah disepakati. istilah implementasi ditawarkan pertama sekali oleh Harold Laswell sebagai pendekatan proses, karena menurutnya terjadinya hal tersebut melalui tahapan yang meliputi *agenda-setting*, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi, dan terminasi[23]. Hal tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

1. Agenda setting yaitu upaya media untuk membuat pemberitaannya tidak semata-mata menjadi alur yang isu dan peristiwa. Ada strategi, ada kerangka yang dimainkan media sehingga pemberitaan mempunyai nilai lebih terhadap persoalan yang muncul.
2. Formulasi yaitu Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan dan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Menjelaskan masalah-masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
3. Legitimasi yaitu kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan, untuk memberikan otoritasi pada proses dasar pemerintahan menerima, mengesahkan atau membenarkan pemegang.

Setelah ketiga hal tersebut ada dan disetujui maka terjadilah upaya impelemntasi. Kemudian dari hasil implementasi dilakukan pada 3 proses lanjutan sebagai sebuah pengembangan. Ketiganya sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:

4. Evaluasi yaitu penaksiran atau penilaian, menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan

---

[23] Erwan Agus Purwanto, *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media,2012,hlm.17.

nilai dari suatu hal, untuk mempertimbangkan sesuatu barang, hal atau gejala dengan mempertimbangkan beragam faktor.

5. Reformulasi yaitu memuat ulang terhadap keadaan atau apapun yang ada.
6. Terminasi yaitu tahap terakhir atau pengakhiran pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat atau sekelompok orang, sebagainya praktik pekerjaan yang sama penting dengan perlibatan dan perencanaan

Dari konsep tersebut memperlihatkan implementasi merupakan suatu upaya untuk menyederhanakan realitas kebijakan yang rumit menjadi lebih sederhana dalam mempraktekkannya[24]. Menurut Moenir faktor faktor adanya implementasi adalah sebagai berikut: (1) Faktor Kesadaran , (2) Faktor Aturan , (3) Faktor Organisasi , (4) Faktor Pendapatan , (5) Faktor Kemampuan-Keterampilan dan (6) Faktor Sarana Pelayanan.

Pertama, faktor kesadaran menunjukkan suatu keadaan pada jiwa seseorang yaitu merupakan titik temu atau equilibrium dari berbagai pertimbangan, sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwa yang bersangkutan. Kesadaran yang dapat dirumuskan sebagai berikut: "*Suatu proses berpikir melalui metode renungan, pertimbangan dan perbandingan, sehingga menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal tolak untuk perbuatan dan tindakan yang akan dilakukan kemudian*[25]"

Dapat disimpulkan dari pengertian tersebut maka kesadaran adalah hasil dari suatu proses yang kadang-kadang memerlukan waktu yang cukup lama, dan dalam keadaan tenang tidak dalam keadaan emosi. Proses tumbuhnya kesadaran berbeda dengan setiap orang baik dalam hal kecepatan atau kualitas. Hal itu tergantung pada kemampuan berpikir, penggunaan rasa

---

[24] Erwan Agus Purwanto, *Implementasi kebijakan publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, hlm.18.

[25] Moenir, Manajemen *Pelayanan umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm.89.

perasaan, pertimbangan, dan perbandingan. Pertimbangan masalah subjek faktor kesadaran kepada hal-hal yang penting, yaitu (1) Disiplin dalam pelaksanaan; dan (2) pengetahuan dan pengalaman.

Pendapat kedua tersebut, menunjang definisi mengenai pertimbangan sebagai subjek faktor kesadaran dan pengetahuan serta pengalaman, dikarnakan kedua definisi tersebut seharusnya sudah diterapkan kesadaran pada masing-masing individu.

Kedua, Faktor aturan menurut moenir adalah perangkat penting dalam tindakan dan perbuatan orang. Makin maju dan majemuk suatu masyarakat makin besar peranan aturan dan dapat dikatakan orang hidup layak dan tenang tanpa aturan. Dapat disimpulkan adanya aturan yang mengikat dalam setiap individu terikat dalam ruang. Mengawasi pelaksana aturan itu, manusia sebagai objek aturan, yaitu mereka yang dikenai oleh aturan itu. Pertimbangan manusia sebagai subjek aturan ditujukan kepada hal-hal yang penting, yaitu: (1) Prosedur, (2) Sistem.

Sistem dan prosedur merupakan dwitunggal yang tak terpisahkan karena satu sama lain saling melengkapi. Sistem merupakan kerangka mekanisme organisasi prosedur adalah rincian dinamikanya mekanisme sistem. Jadi tanpa sistem prosedur tidak ada landasan berpijak untuk "berkiprah", dan tanpa prosedur suatu mekanisme sistem tidak ada berjalan.

Ketiga, Faktor Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi umumnya, namun ada perbedaan sedikit dalam penerapannya, karena sasaran pelayanan ditujukan secara khusus kepada manusia. Organisasi yang dimaksud disini ialah ialah mengorganisir fungsi pelayanan baik dalam bentuk struktur maupun mekanisme yang akan berperan dalam kelancaran pelayanan. Dari definisi faktor organisasi ialah cara mengorganisir dalam sarana pelayanan yang baik melalui struktur yang berlaku dalam instansi (pemerintah), melalui mekanisme kebijakannya agar dapat berperan dalam mutu dan kelancaran pelayanan.

Keempat, faktor pendapatan ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga atau pikiran yang dicurahkan orang atau badan, baik dalam bentuk uang, natural maupun fasilitas, dalam jangka waktu tertentu. Dari definisi tersebut dapat diartikan, jasa pelayanan tidak ada batasnya selama mampu suatu keberhasilan dalam memberikan kontribusi kualitas pelayanan. Dengan mengukut kebutuhan hidup dengan pendapatan, ada dua metode pendekatan yaitu: (1) Kebutuhan Fisik minimum, (2) Kebutuhan hidup minimum.

Kebutuhan hidup seseorang tidak berbeda dengan kebutuhan hidup kelompok masyarakat, kebutuhan fisik minimum masih menggunakan dengan gaji, sehingga secara umum sering dibandingkan dengan gaji. Sedangkan kebutuhan hidup minimum lebih mendekatkan kesejahteraan melalui pendapatan mulai dilakukan merupakan usaha jangka panjang yang bersifat makro.

Kelima, Faktor kemampuan-Keterampilan ialah kemampuan berasal dari kata dasar mampu dalam hubungan tugas berarti dapat melakukan tugas sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai yang diharapkan mengenai keterampilan ialah kemampuan melaksanakan tugas dengan menggunakan anggota badan dan peralatan kerja yang tersedia. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor kemampuan-keterampilan memiliki arti “bisa” , dengan dorongan metifasi dan keyakinan individu memiliki kemampuan yang dapat memberikan kontribusi salah satunya dengan pemberian pelayanan. Seperti bahwa orang bekerja selalu menggunakan paling tidak ada unsur yang ada pada setiap manusia, yaitu otot, kemampuan bahasa

Definisi tersebut dapat dijelaskan mengenai otot terkait faktor kemampuan-keterampilan, ini menjadikan hal penting dalam memberikan pelayanan dikarenakan setiap manusia memiliki otot yang mampu memberikan aktivitas. Selanjutnya mengenai kemampuan bahasa, ini menjadi

hal yang penting dalam seseorang dikarenakan tanpa memiliki kemampuan bahasa yang bener dan baik menjadikan pengaruh terhadap pelayanan.

Keenam, faktor sarana pelayanan"*Ialah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi itu*"

Dapat dijelaskan bahwa pengertian tersebut menunjang faktor sarana pelayanan perlu adanya dukungan dari segi jenis peralatan, perlengkapan, dan fasilitas lainnya dalam melakukan tugasnya dapat terbantu sehingga prosesnya tepat pada waktunya. Fungsi sarana pelayanan tersebut yaitu[26]: (1) Lebih mudah dalam geraknya para pelakunya, (2) Menimbulkan perasaan puas pada orang yang berkepntingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka.

Dapat dijelaskan bahwa dari dua fungsi sarana pelayanan diatas, adanya dukungan dari berbagai segi dari jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas lebih mudah dan sederhana terhadap para pekerjanya memberikan kenyamanan dalam bekerja sehingga mengurangi kesalahan.

Pelayanan hakikatnya merupakan sebuah aktivitas, karena itu pelayanan merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung rutin dan seimbang meliputi keseluruhan hidup orang dalam masyarakat. Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan. Dengan adanya standar, manajemen dapat merencanakan hasil akhir memuaskan pihak yang memperoleh pelayanan.

[26] Moenir, *Manajemen Pelayanan umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.92.

C. Nilai – Nilai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2015

Pemerintah berasal dari kata dasar "perintah" yang secara etimologi dipahami dengan perkataan dengan maksud menyuruh melakukan sesuatu[27]. Kata tersebut kemudian dikembangkan dalam dunia politik dan ketetanegaraan dengan "pemerintah" yang dipahami sebagai sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi, dan politik suatunegara atau bagian-bagiannya[28].

Hal tersebut juga dipahami sebagai komunitas individu secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas; untuk menggunakan kekuasaan; penguasa suatu Negara atau bagian Negara; dan badan tertinggi dari yang memerintah suatu Negara seperti Kabinet dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu DPR[29], MPR[30] dan Presiden[31].

Dalam berbagai varian pemahaman kosa kata pemerintah sebagai sekumpulan masyarakat yang mengelola kewenangan dan kebijakan untuk mengambil keputusan dan pelaksanakan kepemimpinan serta koordinasi pemerintahan dan pembangunan masyarakat dan wilayahnya untuk membentuk sebuah lembaga dimana mereka ditempatkan[32]. Dalam konsep tersebut dikuatkan dalam kajian *siyasah Islam* dengan dua paradigma yaitu: (1) khilafah merupakan pemerintahan yang dibangun berdasarkan

---

[27]Lukman Ali, et el, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm. 1057

[28]Lukman Ali, et el, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, hlm. 1057

[29]DPR singkatan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan represtasi dari utusan rakyat, Ardiyanti, Handrini, *DPR RI Menuju Parlemen Modern*, Jakarta: Publisher, 2015, hlm.29.

[30]MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai bagian dari rskyat terdiri atas anggota DPR dan anggota DPRD yang diangkat melalui aturan Undang Undang. Sekjen MPRI, *Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 dan Ketetapan MPR Republik Indonesia*, Jakarta: Tp, 2014, hlm.71.

[31]Presiden merupakan Kepala lemabaga atau pemerintahan, Lukman Ali, et el, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.1101

[32]Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*, Jakarta: Grafika, 2012, hlm.8.

ketauladanan *Khulafau al-Rasyidin;* (2) Imamah sebagai kepemimpinan dalam pemerintah sebagai sebuah bangunan negara (state)[33]. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah adalah sebuah koordinasi sekumpulan masyarakat untuk mengatur kumpulan tersebut

Setiap Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah yang disebut Kepala Daerah yang dipimpin gubernur. Selanjutnya dikenal dengan Bupati sebagai pimpinan kabupaten serta Walikota sebagai pimpinan untuk wilayah kota[34]. Secara khusus struktur utama pemerintahan Provinsi dan Kabupaten Kota dapat dilihat dalam Tabel Berikut:

TABEL 2.1

Pimpinan utama pada wilayah provinsi Dan kabupaten kota

No	Nama Wilayah	Pimpinan
1	Provinsi	Gubernur
		Wakil Gubernur
		Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi
2	Kota	Walikota
		Wakil Walikota
		Sekretaris Daerah (Sekda) Kota
3	Kabupaten	Bupati
		Wakil Bupati
		Sekratris Daerah (Sekda) Kabupaten
4	Kecamatan	Camat
5	Kelurahan/Desa	Lurah/Kepala Desa
6	Kampung/Dusun	Rukun Warga (RW)
		Rukun Tetangga (RT)/Kadus

[33]Dede Rosyada, et el, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syahid, 2009, hlm.45.

[34]Josef Mario Monteiro, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2014, hlm.12.

Sumber: Olah Data 2019

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD[35], serta memberikan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat berbagai tugas bagi Pemerintahan Daerah yang didasarkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,Pasal 1 (Angka 2) yaitu:

> "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Sesuai dengan perundang-undangan maka pemerintah menyelenggarakan Kegiatan Pemerintah menjadi kewenang, kecuali kegiatan pemerintah yang menjadi kegiatan pemerintah. Dalam penyelenggara tersebut, pemerintah menjalankan otonomi yang luas dengan tujuan mengatur dan mengurus kegiatan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mewujudkan kegiatan yang, konkuren antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk diterapkan pembagian kegiatan Pemerintah yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisien. Dalam istilah tersebut diterapkannya secara

[35]Soenobo Wirjosoegito, *Proses dan perencanaan peraturan perundang*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm.36.

kumulatif untuk satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintah[36].

Menurut Andi Gadjong menyebutkan[37], bahwa yang dimaksud dengan "Pemerintahan Daerah adalah daerah otonomi diselenggarakan secara bersama-sama yang dilakukan seorang kepala wilayah sekaligus merupakan kepala daerah otonomi". Berdasarkan definisi tersebut, maka pengertian dari Pemerintahan Daerah pada dasarnya sama yaitu suatu proses kegiatan antara pihak yang berwenang dengan memberikan perintah, sebagaimana pemerintah menerima dan melaksanakan perintah tersebut.penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

Setelah itu adanya suatu Nilai pada Peraturan Daerah tersebut dimana pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor. 12 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman. Dalam hal ini ajaran Islam menjelaskan bahwa setiap manusia akan mengalami kematian yang tidak pernah diketahui kapan waktunya akan mengalami kematian. Sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT yang ditempatkan derajatnya paling tinggi, maka Umat muslim yang telah meninggal dunia. Dalam ketentuan hukum islam jika seorang muslim meninggal dunia maka hukumnya fardu kifayah atas orang muslim yang masih hidup untuk menyelenggarakan 4 perkara yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan orang yang meninggal.

Nilai pada peraturan adalah suatu yang sudah menjadi pondasi yang sudah tertera pada aturan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota

---

[36]Fakthul Muin, "*Otonomi Daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah*", Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirayasa serang, VIII, Januari-Maret, 2014, hlm.73-74.

[37]Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah : kajian politik dan hukum*, Bogor: Ghalia indonesia, 2007, hlm.15.

Palembang Nomor 12 Tahun 2015 Retribusi Pelayanan pemakaman. Dalam hal ini adanya suatu nilai yang terdapat pada pancasila yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, persaudaraan, tanggung jawab dan keadilan. Penjelasan sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut[38]:

1. Nilai Ketuhanan (Ketauhidan) yang terdapat dalam Bab II tentang Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5.
2. Nilai Kemanusiaan yang terdapat pasal 18, Pasal 21 Ayat (1), Bab XIII Tentang Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Pasal 18, Bab XIV Tentang Keberatan Pasal 19, Pasal 21.
3. Nilai Persaudaraan terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman terlihat dari pengertian pemakaman itu sendiri. Pasal 1 Poin 7 disebutkan Kegiatan atau prosesi penguburan terhadap jenazah atau orang yang secara medis telah diinyatakan meninggal. Demikian pula nilai persaudaraan terdapat dalam penjelasan pasal.
4. Nilai Tanggung Jawab terdapat dalam perda Retribusi pelayanan pemakaman terdapat dalam Bab XV tentang Pengembalian kelebihan pembayaran Pasal 22, Bab XVII Insentif Pemungutan Pasal 25, Bab XVIII tentang Pelaksanaan Pelayanan Pasal 27.
5. Nilai Keadilan terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman terdapat pasal 1, Bab III Pasal 7, pasal 8, Bab VI Pasal 10 , Bab VII Pasal 11.

D. Pelayanan Pemakaman Dalam Hukum Islam

Secara normatif, fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia dan akhirat di dalam sosial masyarakat[39]. Tata aturan atas terminologi tersebut

[38]Ira Alia Maerani: "*Aplikasi Nilai-Nilai Islam dalam peraturan daerah dan problematika pada era otonomi daerah di kota semarang*" Jurnal Hukum. Vol XXVIII, No.2, Desember 2012, hlm.968.

[39]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000,hlm.15.

mengarahkan Negara untuk memperlakukan warganegara dalam bidang pelayanan secara maksimal Dalam Undang Indang Dasar 1945 dijelaskan bahwa negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan warganya tanpa tekecuali, terlepas dari karakteristik yang dimiliki oleh sekelompok warga untuk mengakses pelayanan yang dibutuhkannya[40].

Dalam aturan yang lain dijelaskan bahwa bermuamalah memerlukan keseimbangan antara dunia dan akhirat pada kehidupan manusia yang didasarkan pada ketetapan Allah SWT[41].

Beberapa ketetapan larangan dalam bermuamalah seperti *gharar* atau *Taghrir*[42],*Tadlis*[43], *Ghabn*[44], *Ihtikar*[45],*Al-Maysir*[46], risywah[47], dan *Bai al-Najasy*[48]. Hal tersebut juga dari aspek pemakaman dari sisi permasalahan retribusi dan pungutan terhadap pelayananyang pemakaman tidak ditemukan dalam literatur Islam Klasik. Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang pemakaman

---

[40]Agus Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, hlm.8.

[41]Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013,hlm.113.

[42]suatu keadaan atau situasi dimanai objek atau transaksi yang dijalankan dalam kegiatan usaha Bertentangan dengan prinsip *al-'adalah* (keadilan) dan *la tazlimun walatuzlamun* (tidak menzolimi dan tidak dizolimi)

[43]Merupakan penipuan atas adanya kecacatan dari barang yang diperjual belikan baik dalam pada kuantitas maupun kualitas barang

[44]Ghabn adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata atau dengan harga yang lebih rendah dari harga rata-rata

[45]Merupakan tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali, sedangkan masyarakat, negara ataupun hewan amat memerlukan produk tersebut

[46]Secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja

[47] dikenal dengan suap yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan pelayanan dan bantuan ekstra yang seharusnya menjadi tugas, tanggungjawab, dan kewajiban pemberi pelayanan tersebut

[48] Merupakan suatu rekayasa pasar dalam demand dimana seorang produsen / pembeli menciptakan permintaan palsu , seolah oleh banyak permintaan terhadap suatu produksehingga harga jual produk tersebut akan naik

seorang Muslim dilakukan pada komplek pemakaman yang telah disediakan oleh pemerintah pada waktu yang disediakan oleh pemerintah. Bahkan anjuran-anjuran Nabi Muhammad Saw untuk memfasilitasi dan memberikan bantuan kepada ahli waris mayit yang sangat banyak.

Dari hal tersebut memperlihatkan keutamaan pahala dalam perintah memberikan, membawa dan memasukannya ke dalam tanah adalah memiliki kewajiban. Berdasarkan hasil studi di berbagai daerah wilayah Indonesia persoalan pemakaman menjadi tanggung jawab ahli waris dan pengurus pemakaman tersebut, salah satu contoh di daerah talang petai masyarakat yang mengalami musibah merasakan ringan karna adanya suatu budaya bersama dalam mengurus jenazah. Seiring dengan budaya dan prilaku pemakaman jenazah itu sudah mengalami perubahan dari sesuatu yang gotong royong masyarakat yang hidup terhadap ahli waris yang meninggal menjadi suatu imbalan dalam bentuk pembayaran[49].

Realita tersebut sejalan dengan aturan dari pemerintah daerah yang mengenakan berbagai bentuk pungutan sebagai salah satu sumber pendapatannya, salah satunya dengan wajib bayar pajak melalui retribusi. Dalam ranah agama, aktifitas tersebut dibolehkan dalam Hukum Islam. Penegasan akan hal tersebut sebagaimana diungkapkan Syukri bahwa ritribusi dari aktifitas barang dan jasa dengan meminta bagian pendapatan melalui retribusi dapat dibenarkan dalam Islam. Hel tersebut juga sejalan dengan Q.S. An-Nissa, Ayat 59[50].

---

[49]Tadjuddin Noer Effendi, *Budaya Gotong Royong dalam perubahan sosial saat ini,* Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 2 No.1, Mei 2013, hlm.2.

[50]Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*(Q.S. An-Nissa Ayat 59).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Al Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna ayat tersebut seperti dikutipnya dari al-Bukhari yang diriwayatkan oleh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata tentang firman Allah "Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil Amri diantara kamu". Ayat yang turun berkenaan dengan kisah Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin 'Adi, Ketika diutus oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam di dalam satu pasukan khusus[51]

Sedangkan Ditinjau dari perspektif Fiqh Islam maka selain bentuk ketaatan kepada pemerintah mengenai Retribusi pemakaman terjadi nya Akad Ijarah yaitu Upah mengupah antara ahli waris (keluarga mayit) dan pemerintah daerah. Dalam hukum islam telah ditentukan bahwa Praktek upah mengupah adalah suatu praktek Muamalah yang dimana dalam Fiqh Muamalah sendiri menjelaskan Akad Ijarah mempunyai dua kata. Secara etimologi Akad adalah ا لعقد ة(sambungan) ,العهدdan (Janji)[52].

Sedangkan *Ijarah* menurut etimologi, *Ijarah* adalah menjual atau manfaat. Dari pengertian tersebut adalah janji atas suatu kemanfaatan dengan pengganti yang dimana dalam hal ini pemberian suatu janji dari ahli waris kepada pemerintah dalam bentuk pembayaran retribusi. Diantaranya adalah firman Allah SWT, yaitu QS.Thalaq : 6[53] :

فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَاٰتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ٦

[51]http:faizack.wordpress.com/2010/12/31/tafsir-Ibnu-Katsir-Karya-prof-dr-h. pausil,M.A.

[52]Wahbah Al-Juhailli, *Alfiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV, Damsyik, Dar Al-Fikr, 1989, hlm.80.

[53]Artinya: *kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya* (Q.S. Thalaq ayat 6).

Tafsir Ibnu Katsir bahwasanya apabila mereka telah bersalin[54], sedangkan mereka telah diceraikan dengan talak, maka mereka telah terpisah selamanya dari suaminya negitu iddah mereka habis yaitu melahirkan kandungannya. Dan bagi mereka diperbolehkan menyusui anaknya atau menolaknya untuk menyusuinya, tetapi sesudah air susu pertamanya kepada sang bayi merupakan kebutuhan pertamanya. Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat tidak ada ulama yang membantah Kesepakatan, sekalipun mereka berbeda pendapat. Jelas sudah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan Ijarah yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. Syarat dan rukun Ijarah adalah[55]: (1) Aqidain (orang yang berakad), (2) Shighat Akad, (3) Ujrah (Upah), (4) Manfaat.

Dua pihak yang berakad ini adalah pemerintah daerah yang diwakili oleh petugas pemungut retribusi dan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab terhadap mayat yang dikubur di pemakaman tersebut. Sementara shighat akad atau ucapan akad ijarah bisa diucapkan secara lisan, dalam bentuk tulisan atau kesepakatan yang diketahui kedua pihak. Selanjutnya mengenai Ujrah adalah berupa harta yang dapat diketahu dan tidak boleh sejenis barang manfaat ijarah, seperti upah pada menyewa rumah untuk ditempati dan menempati rumah tersebut[56].

Rumusan fiqh tersebut menjadi satu bentuk sebagai dasar ijarah berdasarkan ketentuan hukum dalam nash, hadis, ijtihad para ulama sebagai pemanfaatan jasa sesuatu yang dikontrak. Jika dikonteskan dalam praktek retribusi pemakaman di palembang, lalu kandungan praktik ijarah dalam pelaksanaan retribusi ini adalah diperbolehkan dengan melalui jalur yang resmi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni Peraturan

[54]http://wordpress//2015/10//tafsir-ibnu-katsir-Karya-Michael-Elkan
[55]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2000, hlm.43.
[56]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, hlm.131.

Daerah Nomor 12 Tahun 2015. Sehingga Retribusi pemakaman dalam ini diperbolehkan sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dilihat dari akadnya maka dalam bentuk ijarah (upah-mengupah) antara pemerintah daerah dan penggunaan pelayanan pemakaman.

E. Nilai Ekonomi Pada Retribusi Pelayanan Pemakaman

Secara etimologi nilai dapat diartikan harga, Dalam penjelasan tersebut tidak terdapat ukuran yang pasti untuk menentukan suatu nilai. Dalam terminologi nilai adalah konsep umum mengenai suatu yang dianggap baik. Sedangkan menurutSprangernilai adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih. Dalam hal ini nilai menjadi suatu harga mengenai tatanan pada suatu menimbang atau memilih suatu hal[57].

Kemajuan sosial pada Nilai adalah suatu persoalan yang menjadikan suatu acuan pada aktivitas manusia seprti sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam hal ini nilai pada suatu Bisnis adalah suatu pertukaran barang jasa atau saling menguntungkan dan memberikan manfaat, Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai " *the buying and selling of goods and* services ". Terlebih dalam hal Bisnis yang berlangsung adanya usaha dan meningkatkan hidup[58]. Untuk itu Sudah menjadi fitrah bagi setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta berusaha memperoleh kekayaan dalam memenuhi hal tersebut. Upaya memperoleh finansial, manusia tidak melakukannya bebas nilai. Ini artinya apa yang dilakukan harus berstandar pada nilai nilai agama dan aturan negara, sehingga aktifitas yang dilakukan mereka memiliki dayaguna dari semua aspek kehidupan[59].

---

[57]Utsman Ali, Pengertian Nilai dan macam-macam nilai, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, hlm.21.

[58]Ika Yunia Fauzia, *etika bisnis dalam bisnis*, sidoarjo : Kencana, 2017, hlm.3.

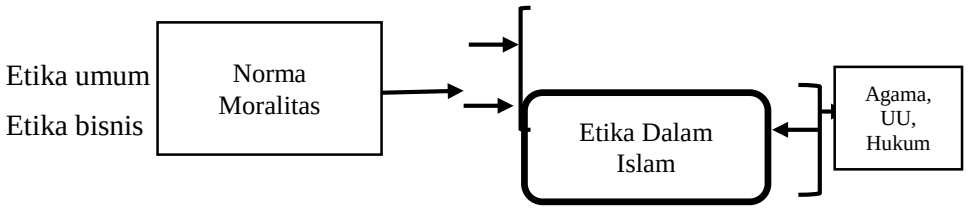
[59]Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada aktivitas Ekonmi)*, Medan: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm.35.

Pelaksanaan atas nilai nilai tersebut diatur juga dalam etika bisnis sebagai pedoman. Untuk umat Islam berstandar pada al-Qu'an dan Hadits Rasulullah Saw, serta ijtihad ulama. Seperti nilai *tijarah* yang mengandung dua makna. *Pertama*, perniagaan yang berorientasi pada Allah Swt melalui implementasi atas nilai nilai perniagaan Islami[60]; *Kedua*, Perniagaan antar manusia untuk mendapatkan keuntungan sebagai salah satu upaya meningkatan kualitas keluarga dan ketahanan ekonomi keluarga. Dari sisi ini maka fiqh muamalah mengajarkan untuk melakukan perubahan dan perbaikan transaksi dari keuntungan *an sich*, ke keuntunugan memiliki nilai nilai hak orang lain dari setiap usaha yang dilakukan[61]".

Realita tersebut memperlihat bahwa ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya serta melakukan perdagangan antara manusia dalam masyarakat secara baik akan terjadi hubungan mutual simbiosis yang bernialai teligius. Secara Konseptual Implementasi etika bisnis dalam kegiatan bisnis disusun berdasarkan norma dan moralitas. Dari dasar etika tersebut maka etika bisnis mendasarkan pada moralitas dan norma, dan juga hukum serta peraturan yang berlaku di indonesia.

Gambar 2.2

Konsep Etika Bisnis



Sumber: Yusuf Qardhawi, 2019

[60] Yusuf Qardhawi, *Peran nilai moral dalam perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Pres, 2004, hlm. 23.

[61] Yusuf Qardhawi, *Peran nilai moral dalam perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Pres, hlm. 350.

Konsep dasar ekonomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang, mengenai pemanfaatan uang, tenaga, dan waktu, serta tata kehidupan perekonomian dalam suatu negara. Menurut Terminologi Ekonomi adalah ilmu yang mengatur. Menurut Muhammad Abdul Manan mengemukakan bahwa *ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat dari nilai-nilai Islam*[62].

Mengenai Nilai Ekonomi terdapat adanya suatu etika dalam distribusi dan retribusi untuk melakukan suatu kegiatan dengan adanya suatu peraturan yang tertera. Selanjutnya mengenai retribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Pungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa" dengan kata lain Retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar[63].

Dalam pemungutan retribusi daerah terdapat beberapa istilah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Daerah Otonomi disebut sebagai daerah adalah kesatuan masyarakat berdasarkan hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan ototnomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

[62]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016, hlm. 29.

[63]Sugianto, *Pajak dan retribusi daerah (pengelolaan pemerintah daerah dalam aspek keuangan, pajak, dan retribusi daerah)*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm.51.

badan. Dalam arti lain, retribusi adalah pembayaran yang wajib dari penduduk kepada negara secara perorangan.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atas pemberian izin untuk menggunakan suatu benda yang khusus, yang telah disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang secara pribadi atau badan[64]. Selanjutnya nilai ekonomi pada Retribusi adalah adanya suatu nilai etika yang dilakukan untuk melakukan suatu perbuatan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukannya suatu Retribusi yang dikeluarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Retribusi pelayanan pemakaman tanpa adanya suatu kekurangan.

Selanjutnya mengenai nilai ekonomi pada retribusi harus adanya Prinsip nilai yang sesuai dengan hukum islam, yang memiliki beberapa prinsip di antaranya[65]: *pertama*, prinsip tauhid adalah prinsip umum hukum Islam yang menyatakan bahwa manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid dinyatakan dalam kalimat *la ila ha illa llah*. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. *Kedua*, keadilan istilah ini berkonotasi dengan keputusan penetapan hukum atau kebijakan. Keadilan menurut Islam meliputi bergerak aspek kehidupan, khususnya dalam bidang sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan meliputi keadilan dalam hubungan. Hubungan antara individu antar individu dengan hakim yang berperkara serta berbagai pihak terkait[66]. *Ketiga*, Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar berarti hukum Islam digerakkan untuk manusia menuju tujuan yang baik dan benar dan diridhoi oleh Allah SWT. Dapat diartikan bahwa salah satu sistem untuk menislahkan masyarakat. Atas prinsip ini

---

[64]Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.616.

[65]Supardin, *Materi hukum Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2011, hlm.22.

[66]Husnul Khatimah, *Penerapan Syariah Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm.29.

hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan. *Keempat,* Prinsip kebebasan yang diartikan bahwa kebebasan dalam arti luas, yang mencakup berbagai macam, baik berupa kebebasan individual dan kelompok, kebebasan beragama, berserikat, dan berpolitik. Prinsip ini menghendaki agar agama dan hukum Islam tidak berdasarkan paksaan, tetapi melalui penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi, serta pernyataan yang menyakinkan.

Kelima, Prinsip persamaan yang berlandasan dalam Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an.Surah al-Hujurat : 13[67].

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Keenam, Prinsip tolong menolong yang diartikan bantu membantu antara sesama masyarakat yang sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam meingkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT[68]. Dengan demikian nilai ekonomi pada retribusi merupakan suatu bentuk nilai ketaatan pada etika yang pada dasarnya menjadikan suatu tata aturan dalam pelayanan pemakaman tersebut sehingga dalam suatu etika harus adanya nilai pada pelayanan dan tidak mengakibatkan nilai yang berbeda-beda pada keduanya yaitu antara ahli waris dan pengurus jenazah.

---

[67]Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah o orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguh3nya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (Q.S. Al-Hujurat ayat 13).

[68]Husnul Khatimah, *Penerapan Syariah Islam*, hlm.35.